

**EVALUASI PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN INVESTASI
PROVINSI SUMATERA BARAT****Ahmad Zakki^{1b}, Samsyir¹****Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang**^{1b} Jack.famous.az@gmail.com**Abstract**

This study intends to determine the Evaluation of Role of the Investment Service and One-Stop Integrated Services in Increasing Investment in the Province of West Sumatra. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods; in determining the informants, researchers used purposive sampling methods, and techniques for data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Researchers used a method triangulation technique to test the data's validity for data analysis techniques using data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that evaluating the role of the West Sumatra Province Investment and One-Stop Services Service (DPMPTSP) in increasing investment in West Sumatra Province, there were three evaluations carried out, namely: (1) Policy Evaluation; (2) Program Evaluation; (3) Resource Evaluation as for the inhibiting factors, namely the lack of understanding from applicants or investors regarding onerous licensing requirements and policy regulations.

Keywords: Evaluation, Role, Investment**Abstrak**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Evaluasi Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Investasi Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan investasi Provinsi Sumatera Barat terdapat 3 evaluasi yang dilaksanakan yaitu: (1) Evaluasi Kebijakan; (2) Evaluasi Program; (3) Evaluasi Sumber Daya. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman dari pemohon atau investor mengenai persyaratan perizinan yang sulit serta regulasi kebijakan.

Kata Kunci: Evaluasi, Peran, Investasi

Pendahuluan

Penanaman modal berperan penting dalam pembangunan ekonomi, karena melalui penanaman modal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan menjaga kesinambungan laju pertumbuhan ekonomi. Laju perekonomian yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal di Indonesia baik dengan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adanya peningkatan penanaman modal diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

Peningkatan penanaman modal tersebut dapat terjadi apabila usaha pemerintah pusat dibantu oleh instansi yang terkait dengan penanaman modal, instansi tersebut haruslah bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugasnya selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap penanaman modal tersebut.

Penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi dasar pelaksanaan penanaman modal adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal. Investasi merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Laju investasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan bangsa.

Provinsi Sumatera Barat memiliki peluang investasi untuk menarik investor, karena memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang belum optimal pemanfaatannya, dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri. Salah satu upaya peningkatan investasi di daerah adalah dengan mengubah paradigma birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan kepada investor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan kreativitas dalam mempromosikan potensi penanaman modal daerahnya, khususnya di provinsi sumatera barat.

Target kinerja investasi penanaman modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depan semakin besar, sementara tingkat persaingan antar kawasan untuk menarik investasi semakin ketat. Maka diharapkan pencapaian target investasi semakin meningkat melalui berbagai penataan dan penyempurnaan, dimulai dari penataan berbagai kebijakan sektor terkait, perkuatan koordinasi antar pengambil keputusan, sampai kepada perbaikan prosedur perizinan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta memudahkan pelayanan kepada para penanam modal.

Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah tingkat Provinsi yang memberikan pelayanan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk menggiatkan perekonomian melalui pemulihan iklim investasi yang menarik dan kondusif agar dapat menggairahkan calon investor untuk menanamkan modalnya, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan dalam “paket reformasi kebijaksanaan investasi”, salah satunya melimpahkan wewenang pemberian persetujuan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non-perizi-

nan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal. Ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mencakup pelayanan semua jenis perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal.

Ada sejumlah faktor yang berpengaruh pada iklim investasi, yakni stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastruktur dasar, sektor pembiayaan, pasar tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, korupsi, konsistensi dan kepastian kebijakan. Bank Dunia Melaporkan tentang iklim investasi (World Bank, 2009), diantara faktor-faktor tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting. The World Economic Forum (WEF) yang hasilnya ditunjukkan di dalam laporan tahunannya, The Global Competitiveness Report. berdasarkan persentase dari responden, ternyata tiga faktor penghambat bisnis yang mendapatkan peringkat paling atas adalah berturut-turut birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), setidaknya ada lima kendala yang sering dihadapi investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat investasi asing ke Indonesia menurun. Lima kendala tersebut yaitu: (1) regulasi berbelit; (2) akuisisi lahan yang sulit; (3) infrastruktur publik yang belum merata; (4) pajak dan insentif nonfiskal lain yang tidak mendukung investasi; dan (5) tenaga kerja terampil yang belum memadai (vivanews.com, 15 September 2019).

DPMTPSP dituntut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui kemudahan proses perizinan, sehingga dapat meningkatkan semangat berwirausaha masyarakat. Selain itu melalui promosi peluang investasi diharapkan dapat meningkatkan investasi yang masuk, baik dalam bentuk PMDN maupun PMA.

Dalam mempromosikan peluang investasi dibutuhkan data dukung agar calon investor berminat untuk berinvestasi. Permasalahan selama ini adalah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki banyak data Studi Kelayakan maupun Grand Design Peluang Investasi, hal tersebut berakibat pada kurangnya data-data yang dibutuhkan untuk mempromosikan peluang investasi. Promosi peluang investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai investasi masuk, banyak cara dilakukan untuk mempromosikan investasi, baik melalui pameran, maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga promosi peluang investasi dapat diakses oleh siapa saja.

Sebagai SKPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, setiap aparat yang bekerja dituntut untuk dapat memaksimalkan pelayanan sesuai dengan Standar Kerja yang lazim disebut dengan Standar Operasional Prosedur, maka aparatur yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, hal ini menyangkut dengan ketepatan dan kecepatan dan keramah-tamahan layanan.

Terbatasnya SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanaman modal (PMA/PMDN). Selain itu juga ditemui masalah kurangnya tenaga teknislapangan terkait perizinan teknis, seperti ; ahli teknik sipil, ahli lingkungan, dan ahli ilmu kesehatan lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive -

sampling. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan investasi Provinsi Sumatera Barat akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: pertama, evaluasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan investasi Provinsi Sumatera Barat. Kedua, faktor penghambat dalam evaluasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan investasi Provinsi Sumatera Barat.

1. Bagaimana evaluasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan investasi Provinsi Sumatera Barat.

Investasi adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah karena tidak mungkin semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan anggaran pemerintah saja. Pastinya diperlukan pihak swasta untuk melakukan bantuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya yang pendapat yang disampaikan oleh Tandelilin (2010:7) investasi adalah mempersiapkan kehidupan kedepan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup atau mempertahankan pendapatan yang sudah ada sekarang agar tidak berkurang dimasa depan.

Evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program, dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Menurut Wirawan (2016:123) dalam bukunya terdapat jenis-jenis evaluasi yaitu:

1.1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik (Subarsono, 2008). Lebih lanjut Nugroho mengatakan bahwa kebijakan harus didasari oleh perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan sebelumnya yang berdasar pada hasil evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menjadi pola penting dalam mengetahui apakah kebijakan yang sudah diimplementasikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil yang baik, kecepatan dalam pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai masukan dalam evaluasi kebijakan dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan atau reformasi dalam kebijakan yang merupakan transmisi antara evaluasi dan formulasi kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah apakah mengganti kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan yang baru, atau melanjutkan kebijakan yang sudah ada dengan pola dan metode yang lebih baik (Nugroho, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Kebijakan Pemerintah dalam rangka pena-

naman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 serta yang terbaru yaitu undang-undang cipta kerja, memberikan dua kategori penanam modal yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk kebijakan dalam penanaman modal di Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal.

Untuk evaluasi kebijakan dalam investasi di Provinsi Sumatera Barat yakni berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal. Tetapi faktanya kebijakan ini belum menimbulkan output dengan baik sebab regulasi sering berubah-ubah, dituntut selalu mengikuti dan melaksanakan aturan tersebut.

1.2. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menjalankan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation).

Berdasarkan hasil penelitian program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Sumatera yaitu FGD atau Focus Group Discussion. Di FGD ini akan diidentifikasi peluang-peluang investasi, setelah mengidentifikasi peluang investasinya, baru dilaksanakan penyusunan kajian investasi berupa Project Prospectus. Setelah penyusunan Project Prospectus adalah melakukan Business Gathering (Temu Usaha) sampai berujung pada proses MoU (Memorandum of Understanding) atau Perjanjian Kerja Sama. Selain itu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan promosi. Adapun bentuk promosi ada 2 (dua) tahap yaitu identifikasi dan penyusunan kajian, di Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal melaksanakan Bussines Gathering sampai dengan adanya MoU antara kedua belah pihak.

1.3. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa para aparatur telah dibekali pengetahuan dalam mempromosikan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat menarik investasi. Pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dalam peningkatan organisasi yaitu program pendidikan dan pelatihan, manajemen kepemimpinan dan motivasi anggota. Pengembangan sumber daya instansi bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan investasi di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Dinas DPMTSP Provinsi Sumatera Barat diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Dalam bidang pendidikan, kepala dinas mendorong dan memotivasi para pejabat maupun staf ASN maupun Non ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Faktor penghambat dalam evaluasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan investasi Provinsi Sumatera Barat.

2.1. Kurangnya pemahaman dari pemohon atau investor mengenai persyaratan perizinan

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang. Dalam pengurusan persyaratan perizinan seorang investor harus terlebih memahami syarat dalam pengurusan.

Pelayanan perizinan telah dilaksanakan melalui Online Single Submission dikembangkan guna mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan berusaha dan penanaman modal, OSS sebuah upaya pemerintahan pusat untuk mempermudah perizinan usaha dan pelayanan perizinan yang cepat sehingga kebijakan ini dapat memberi peningkatan pada perekonomian nasional. Dengan demikian harapan dari Online Single Submission memberikan kemudahan berusaha terutama dari segi perizinan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di seluruh wilayah Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMTSP Provinsi Sumatera Barat yakni kurangnya pemahaman dari pemohon atau investor mengenai persyaratan perizinan yang sulit, sehingga saat mereka mengurus perizinan ada beberapa persyaratan yang kurang sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan perizinan tersebut. Padahal untuk mengurus surat izin telah dilaksanakan melalui online single submission.

2.2. Regulasi kebijakan

Kebijakan juga menjadi faktor yang penting dalam mengelola investasi di Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan yang dimiliki tentunya akan menentukan kenyamanan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Barat. Tanpa suatu kebijakan dasar penanaman modal tentunya akan dapat berakibat pada pengaturan yang parsial dan terkesan hanya menjadi kebutuhan sesaat. Selain itu, kebijakan investasi harus memberikan kemudahan bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Barat.

DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat mengacu pada aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan perwujudan strategi untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Sumatera Barat terkait dengan regulasi kebijakan. Sebab tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat serta tanah kaum dan sebagainya sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyelesaian permasalahan lahan. Selain itu kebijakan RTRW Provinsi, Kabupaten dan kota yang belum ramah dengan investasi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai evaluasi peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam meningkatkan investasi provinsi sumatera barat, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan investasi Provinsi Sumatera Barat terdapat 3 evaluasi yang dilaksanakan yaitu: (1) Evaluasi Kebijakan dalam investasi di Provinsi Sumatera Barat yakni berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2014 tenta-

ng Penanaman Modal; (2) Evaluasi Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Sumatera yaitu FGD atau Focus Group Discussion. Setelah mengidentifikasi peluang investasinya, baru dilaksanakan penyusunan kajian investasi berupa Project Prospectus. Setelah penyusunan Project Prospectus adalah melakukan Business Gathering (Temu Usaha) sampai berujung pada proses MoU (Memorandum of Understanding) atau Perjanjian Kerja Sama; (3) Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) bahwa para aparatur telah dibekali pengetahuan dalam mempromosikan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat menarik investasi. Pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dalam peningkatan organisasi yaitu program pendidikan dan pelatihan, manajemen kepemimpinan dan motivasi anggota.

2. Faktor penghambat dalam evaluasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan investasi Provinsi Sumatera Barat.

Faktor penghambat peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Barat yaitu kurangnya pemahaman dari pemohon atau investor mengenai persyaratan perizinan yang sulit serta regulasi kebijakan. Sebab tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat serta tanah kaum dan sebagainya sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyelesaian permasalahan lahan.

Daftar Pustaka

- Edy, Sutrisno. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana Prenada
- Kumano. Y. 2001. Authentic Assessment and Portofolio Assessment – its Theory and Practice. Shizouka University Japan
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi Hadari. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ngalim, Purwanto. 2002. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Setiawati, Wiwien. 2015. Penyusunan Standard Operating Prosedur (SOP). Surabaya: PT. Sketsa Cipta Graha.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Wirawan. 2016. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat
- Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada Media Grup
- Zainul dan Nasution. 2001. Penilaian Hasil Belajar. Jakarta: Dirjen Dikti
- Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017